



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



GERMAS
Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat



INDONESIA
2045



layanan kesehatan

LAPORAN TAHUNAN

2019



**KANTOR KESEHATAN PELABUHAN
KELAS I MAKASSAR**



www.kkpmakassar.com



[@kkpkelas1makassar](https://www.facebook.com/kkpkkelas1makassar)



[@kkp_makassar](https://www.instagram.com/kkp_makassar)



[@kkp_makassar](https://twitter.com/kkp_makassar)

KATA PENGANTAR



Kami panjatkan puji syukur atas ridha dan rahmat Allah SWT sehingga Laporan Tahunan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar tahun 2019 dapat tersusun. Penyusunan Laporan Tahunan ini merupakan salah satu sarana untuk memberikan gambaran dari berbagai hasil kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar pada periode tahun 2019.

Diharapkan berbagai data dan informasi dalam laporan tahunan ini dapat dipergunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi dari kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan dan dapat dijadikan referensi guna penyusunan rencana kegiatan yang akan datang.

Kritik, saran, tanggapan dan peran serta semua pihak sangat kami harapkan, guna peningkatan kualitas data dan validasi informasi (evidence based) dalam penyusunan Laporan Tahunan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar. Terima kasih.



Makassar, Januari 2020

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas I Makassar

dr. Darmawali Handoko, M. Epid
NIP 196911252002121003

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL GAMBAR DAN GRAFIK.....	iii
BAB I ANALISA SITUASI AWAL TAHUN	
A. HAMBATAN TAHUN LALU	1
B. KELEMBAGAAN	1
C. SUMBER DAYA	6
BAB II TUJUAN DAN SASARAN KERJA	
A. DASAR HUKUM	14
B. TUJUAN, SASARAN, DAN INDKATOR	15
BAB III STRATEGI PELAKSANAAN	
A. STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN	18
B. HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN STRATEGI	22
C. TEROBOSAN YANG DILAKUKAN	23
BAB IV HASIL KERJA	
A. PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN	26
B. PENCAPAIAN KINERJA	28
C. REALISASI ANGGARAN	29
D. UPAYA MERAH WTP DAN REFORMASI BIROKRASI	39
BAB IV PENUTUP	40

DAFTAR TABEL

TABEL	HALAMAN
I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kantor Induk/Wilayah Kerja/Pos Pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2019	7
I.2 Jumlah Pegawai Menurut Bagian/Bidang di Kantor Induk Pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2019	8
I.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2019.....	8
I.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2019	8
I.5 Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Mutasi Pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2019.....	9
I.6 Rekapitulasi Kendaraan Roda 4 KKP Kelas I Makassar Tahun 2019.....	10
I.7 Rekapitulasi Kendaraan Roda 2 KKP Kelas I Makassar Tahun 2019.....	11
I.8 Rekapitulasi Tanah dan Bangunan KKP Kelas I Makassar Tahun 2019 .	12
II.1 Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2019	16
II.2 Tabel Target per Kegiatan pada RKAKL KKP Kelas I Makassar Tahun 2019	17
IV.1 Pencapaian Target Perjanjian Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2019	26
IV.2 Tabel Pencapaian Target per Kegiatan pada RKAKL KKP Kelas I Makassar Tahun 2019	28
IV.3 Distribusi Realisasi Anggaran Belanja DIPA/RKAKL Pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2019	29
IV.4 Distribusi Realisasi Anggaran Per Kegiatan DIPA/RKAKL Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2019.....	29

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	HALAMAN
I.1 Struktur Organisasi KKP Kelas I Makassar Tahun 2019	5
III.1 Pertemuan Pembahasan ROK UPT Ditjen P2P Regional Sulawesi	24
III.2 Pre Assessment oleh Tim Itjen Kemenkes RI	24
III.3 Rapat Sinkronisasi ROK Tahun 2020	25

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK	HALAMAN
I.1 Jumlah Pegawai KKP Kelas I Makassar Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019	6
I.2 Jumlah Pegawai KKP Kelas I Makassar Berdasarkan Umur Tahun 2019	6

BAB I

ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN

A. HAMBATAN TAHUN LALU

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar pada tahun 2019 antara lain :

1. Tidak semua wilayah kerja memiliki gedung kantor sendiri sehingga harus menyewa ruangan.
2. Tenaga di wilker masih terbatas sedangkan kegiatan yang dilaksanakan mewakili semua bidang dan bagian yang ada di induk.
3. Penerapan sinkarkes online untuk pencetakan semua dokumen yang diterbitkan oleh KKP masih terkendala oleh jaringan internet di beberapa wilayah kerja dan masih terjadi *error* pada aplikasi sinkarkes sehingga masih membutuhkan dokumen manual melalui generate dokumen.
4. Tidak tercapainya target PNBPN sehingga mengakibatkan penundaan beberapa kegiatan yang terkait dengan indikator perjanjian kinerja.
5. Belum adanya pengukuhan Pejabat Karantina untuk penindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Kekejarantinaan Kesehatan.

B. KELEMBAGAAN

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011 tentang Perubahan Atas Permenkes Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan yang selanjutnya disebut KKP adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, disebutkan bahwa KKP terdiri dari Bagian Tata Usaha, Bidang Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi, Bidang Pengendalian Risiko Lingkungan, Bidang Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah, Wilayah Kerja, Kelompok Fungsional dan Instalasi.

Wilayah kewenangan KKP Kelas I Makassar terdiri dari KKP Induk di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin (dalam proses pengusulan) dan 9 (sembilan) wilayah kerja dan 2 (dua) pos yang tersebar di 2 (dua) provinsi yaitu Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Wilker yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari Pelabuhan Laut Makassar (dalam proses pengusulan), Pelabuhan Laut Biringkassi, Pelabuhan Laut Awerange, Pelabuhan Laut

Parepare, Pelabuhan Laut Palopo, Pelabuhan Laut Malili, Pelabuhan Laut Bajoe, Pos Pelabuhan Bira Bulukumba dan Pos Pelabuhan Rakyat Paotere. Wilayah kerja di Provinsi Sulawesi Barat yaitu Pelabuhan Laut Belangbelang dan Bandara Tampa Padang. Wilayah kerja yang sementara dalam proses pengusulan adalah Pelabuhan Laut Mamuju dan Pelabuhan Laut Pasangkayu.

Tahun 2018 dilaksanakan pembangunan gedung Wilker Mamuju yang terletak di Jalan Poros Mamuju Pasangkayu KM 33 Mamuju yang terdiri dari 4 (empat) gedung yaitu : gedung pelayanan, gedung kantor, rumah dinas dan gudang. Peresmian gedung dilaksanakan pada tahun 2019 yang dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI, Gubernur Sulawesi Selatan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, lintas sektor dan lintas program yang ada di wilayah Sulawesi Barat. Dalam sambutan Dirjen P2P mengharapkan agar KKP Sulawesi Barat segera terbentuk sebagai satuan kerja tersendiri..

1. Tugas Pokok

Pencegahan masuk & keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, survailans epidemiologi, kekarantinaan, pengawasan OMKABA, pelayanan kesehatan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, bioterrorism, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

2. Fungsi

- a. Pelaksanaan kekarantinaan
- b. Pelaksanan pelayanan kesehatan
- c. Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara
- d. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali,
- e. Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi dan kimia
- f. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring SE sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional dan internasional
- g. Pelaksanaan, fasilitas dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan KLB dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk
- h. Pelaksanaan fasilitas dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara

- i. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan OMKABA ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKABA import
- j. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya
- k. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara
- l. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara
- m. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara
- n. Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan dan survailans kesehatan pelabuhan
- o. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara
- p. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP

3. Visi dan Misi

KKP Kelas I Makassar sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Kementerian Kesehatan yang dibawah dan bertanggung jawab kepada Ditjen P2P tentunya mendukung dan turut berkontribusi dalam pencapaian program P2P dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsi KKP dalam upaya preventif dan promotif di wilayah Pelabuhan dan Bandara yang menjadi wilayah kerja KKP Makassar.

Dalam Rencana Aksi Program PP dan PL 2015 - 2019 tidak ada visi dan misi Direktorat Jenderal. Rencana Aksi Program PP dan PL mendukung pelaksanaan Renstra Kemenkes yang melaksanakan visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong". Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu:

1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

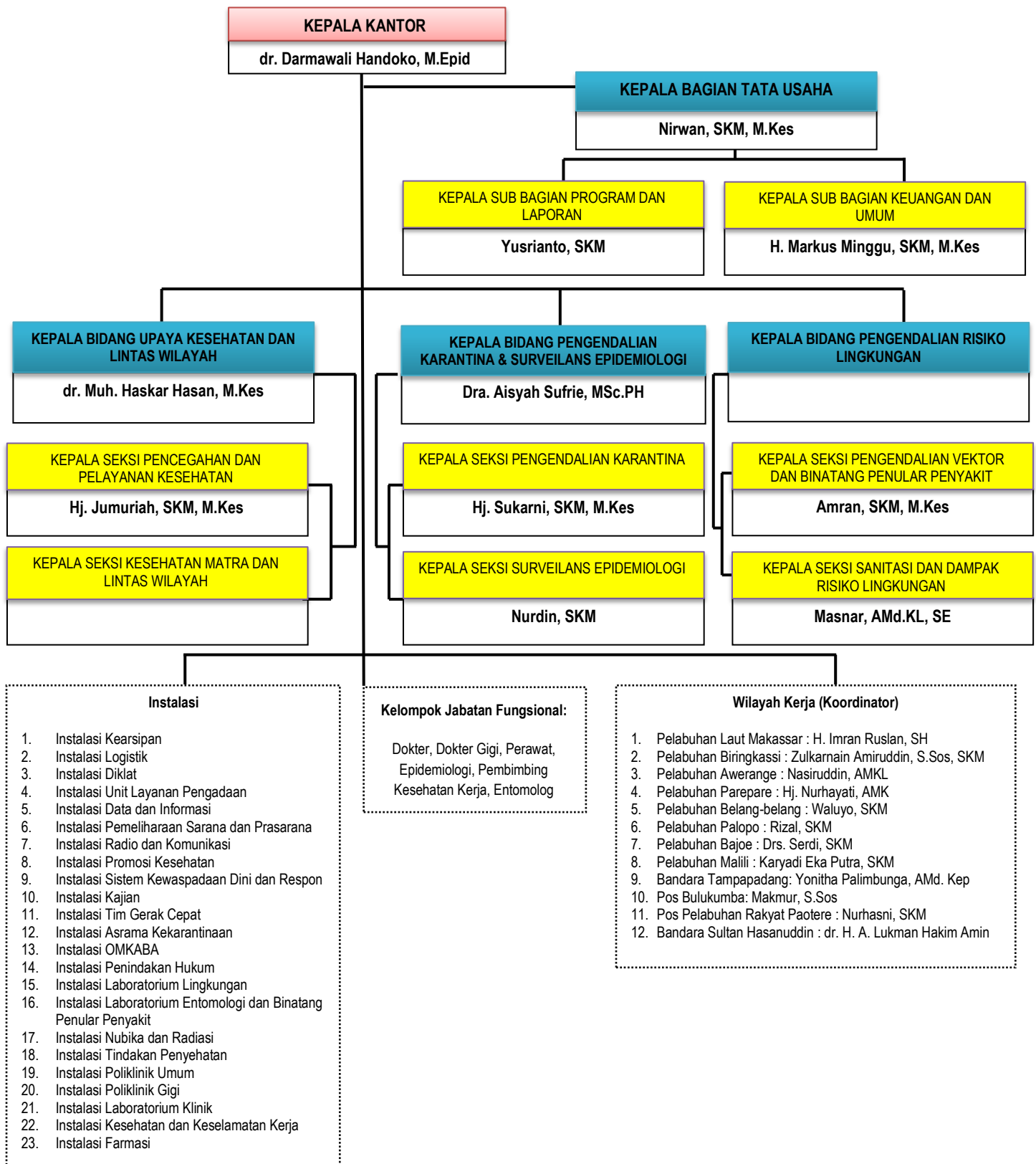
Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang ingin diwujudkan pada Kabinet Kerja, yakni:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan tata kerja KKP Kelas I Makassar mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 356/MENKES/PER/IV/2008 Jo Permenkes Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011; tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Selama tahun 2019 tidak ada penambahan pejabat struktural baru, dua jabatan kosong yakni Kepala Bidang Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kepala Seksi Kesehatan Matra dan Lintas Wilayah masih ditempati oleh pelaksana tugas (Plt). Kepala Bidang Pengendalian Risiko Lingkungan ditempati oleh Yusrianto, SKM dan Kepala Seksi Kesehatan Matra dan Lintas Wilayah ditempati oleh dr. Andi Lukman Hakim Amin. Koordinator Pos Pelabuhan Rakyat Paotere, Alfius Limba memasuki masa pensiun di akhir tahun 2018 sehingga digantikan oleh Nurhasni, SKM di tahun 2019.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi KKP Kelas I Makassar Tahun 2019

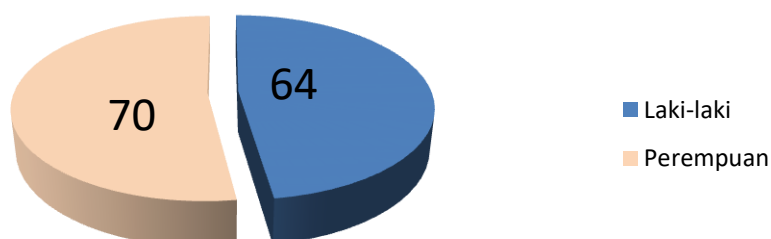
C. SUMBER DAYA

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) berperan sangat penting karena merupakan pelaksana kegiatan. Berdasarkan data SIMKA pada Daftar Urut Kepangkatan (DUK) hingga bulan Desember 2019 terdapat 134 orang, pegawai yang telah meninggal satu orang masih terdaftar di data SIMKA tahun 2019. Distribusi pegawai berdasarkan Jenis Kelamin, Bagian/Bidang/Wilayah Kerja/Pos, golongan dan tingkat pendidikan, dll dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

1. Berdasarkan Jenis Kelamin

Grafik I.1 Jumlah Pegawai KKP Kelas I Makassar Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019

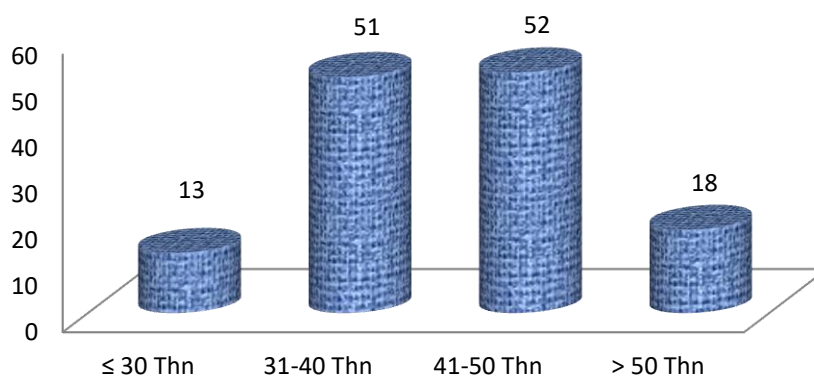


Sumber : Data SIMKA, 2019

Berdasarkan grafik I.1 terlihat bahwa jumlah laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda, laki-laki sebanyak 64 orang (47,76%) dan perempuan sebanyak 70 orang (52,24%) dengan jumlah total 134 orang.

2. Berdasarkan Umur

Grafik I.2 Jumlah Pegawai KKP Kelas I Makassar Berdasarkan Umur Tahun 2019



Sumber : Data SIMKA, 2019

Berdasarkan grafik I.2 menunjukkan jumlah pegawai dengan kelompok umur 41 – 50 tahun adalah yang terbanyak di KKP Kelas I Makassar yakni sebanyak 52 orang, sedangkan yang paling sedikit adalah kelompok umur di atas \leq 30 tahun sebanyak 13 orang.

3. Berdasarkan Bagian/Bidang/Wilayah Kerja/Pos

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kantor Induk/Wilayah Kerja/Pos Pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2019

No	Wilayah kerja	2017
1	Kantor Induk (Bandara Hasanuddin Makassar)	80
2	Wilayah kerja Pelabuhan Laut Makassar	20
3	Wilayah Kerja Pelabuhan Khusus Biringkassi	3
4	Wilayah kerja Pelabuhan Parepare	6
5	Wilayah Kerja Pelabuhan Awerange	2
6	Wilayah Kerja Pelabuhan Belang-belang dan Bandara Tampapadang (Sulawesi Barat)	8
7	Wilayah Kerja Pelabuhan Palopo	4
8	Wilayah Kerja Pelabuhan Bajoe	5
9	Wilayah Kerja Pelabuhan Malili	2
10	Pos Pelabuhan Bulukumba	2
11	Pos Pelabuhan Rakyat Paotere	2
Jumlah		134

Sumber : Data SIMKA, 2019

Berdasarkan tabel I.1 di atas menunjukkan jumlah pegawai paling banyak ditempatkan di Kantor Induk yang berlokasi di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yakni sebanyak 80 orang yang terdiri dari Bagian Tata Usaha, Bidang UKLW, Bidang PKSE dan Bidang PRL, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel III.2. Sedangkan untuk Wilayah Kerja terbanyak di Pelabuhan Laut Makassar sebanyak 20 orang yang juga terdiri dari berbagai Bidang/Bagian. Untuk Wilayah Kerja/Pos lain disesuaikan dengan kebutuhan pada Wilayah Kerja tersebut.

Tabel I.2 Jumlah Pegawai Menurut Bagian/Bidang di Kantor Induk Pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2019

No	Bagian/Bidang	2019
1	Kepala Kantor	1
2	Bagian Tata Usaha (TU)	22
3	Bidang Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi (PKSE)	13
4	Bidang Pengendalian Risiko Lingkungan (PRL)	14
5	Bidang Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah (UKLW)	30
	Jumlah	80

Sumber : Data SIMKA, 2019

4. Berdasarkan Golongan

Tabel I.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2019

Golongan	2019	%
II	20	23%
III	93	64%
IV	21	13%
Jumlah	134	100

Sumber : Data SIMKA, 2019

Dari Tabel I.3 diatas, dapat diinformasikan bahwa jumlah Pegawai KKP Kelas I Makassar tahun 2019 berdasarkan Golongan, terbesar adalah Golongan III sebanyak 93 orang (69%), untuk Golongan II sebanyak 20 orang (15%), dan untuk Golongan IV sebanyak 21 orang (16 %)

5. Berdasarkan Pendidikan

Tabel I.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2019

Tingkat Pendidikan	2019
S2	46
S1	45
DIV	3
DIII	36
SMA	4
Jumlah	134

Sumber : Data SIMKA, 2019

Berdasarkan Tabel I.4 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 20179 distribusi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah tertinggi pada pegawai dengan tingkat pendidikan S2 yakni sebanyak 46 orang dan terendah pada tingkat pendidikan DIV sebanyak 3 orang. Pada aplikasi SIMKA, kategori tingkat pendidikan yang masuk ke dalam S2 yakni pendidikan dokter, apoteker, ners, dan magister.

6. Mutasi Pegawai

Tabel I.5 Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Mutasi Pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2019

Jenis Mutasi	2019
Kenaikan Pangkat	37
Pensiun	1
Mutasi Masuk	4
Mutasi Keluar	1
Meninggal	1
CPNS	1
Jumlah	45

Sumber : Data SIMKA, 2019

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa jumlah kenaikan pangkat (fungsional, penyesuaian dan reguler) tertinggi pada tahun 2019 yaitu 37 orang (28 orang kenaikan pangkat di Bulan April 2019 dan 9 orang kenaikan pangkat di Bulan Oktober 2019). Pegawai yang mutasi masuk ke KKP Kelas I Makassar sebanyak 4 orang dan mutasi keluar sebanyak 1 orang ke KKP Kelas II Cilacap. Meninggal satu orang dokter. Tahun 2019 KKP Kelas I Makassar membuka formasi Epidemiolog dan lulus satu orang CPNS.

2. Sarana Prasarana

Inventaris Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2019 terdiri dari barang bergerak dan barang tidak bergerak.

1) Barang Bergerak

Data barang bergerak berupa kendaraan roda 4, roda 2 dan kendaraan bermotor lainnya tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel I.6 Rekapitulasi Kendaraan Roda 4 KKP Kelas I Makassar Tahun 2019

No	Nama Barang	Merek/Type	Jumlah	Keterangan	Status
1	Station Wagon	Mitsubishi Pajero	1	Kendaraan Kepala Kantor	Baik
2	Kendaraan Penumpang Lainnya	Hino	1	Mobil Jemputan Pegawai	Baik
3	Mobil Ambulance	Mitshubishi L200	1	Ambulance Wilker Mamuju	Rusak Ringan
4	Mobil Ambulance	Mitshubishi L300	1	Ambulance Eks Awerange	Rusak Ringan
5	Mobil Ambulance	Izusu NHR55	1	Ambulance Bulukumba	Baik
6	Mobil Ambulance	Suzuki APV	1	Ambulance Kantor Induk	Baik
7	Mobil Ambulance	Suzuki PAV Arena	1	Ambulance Wilker Parepare	Baik
8	Mobil Ambulance	Toyota HI ACE	1	Ambulance Bandara	Baik
9	Mobil Ambulance	Toyota HI ACE	1	Ambulance Bandara	Baik
10	Mobil Ambulance	Suzuki APV Luxury	1	Ambulance Wilker Bajoe	Baik
11	Mobil Ambulance	Suzuki APV Luxury	1	Ambulance Wilker Awerange	Baik
12	Mobil Ambulance	Suzuki APV Luxury	1	Ambulance Mamuju	Baik
10	Kendaraan Klinik	Izusu 120 PS	1	Kendaraan Rongen	Rusak Berat
11	Kendaraan Taktis	Ford Ranger 2.9	1	Kendaraan Operasional	Baik
12	Kendaraan Taktis	Daihatsu Terios MT	1	Kendaraan Operasional	Rusak Berat
13	Kendaraan Taktis	Daihatsu Terios MT	1	Kendaraan Operasional	Baik
14	Kendaraan Taktis	Toyota Rush GM	1	Kendaraan Operasional	Baik
15	Kendaraan Taktis	Nissan Evalia	1	Kendaraan Operasional	Baik
16	Kendaraan Taktis	Toyota Rush 7-Seater	2	Kendaraan Operasional	Baik
Jumlah			17	Unit	

Sumber : Data Laporan BMN KKP Kelas I Makassar, 2019

Berdasarkan tabel rekapitulasi kendaraan roda 4 terlihat dari 17 kendaraan roda 4 yang dimiliki KKP Kelas I Makassar terdapat 2 ambulance dengan kondisi rusak ringan dan 2 kendaraan dalam kondisi rusak berat yakni 1 kendaraan klinik dan 1 kendaraan taktis.

Tahun 2019 terdapat tiga kendaraan yang dilelang yakni 1 unit Station Wagon merek/tipe Toyota Kijang Grand Lux Luxury tahun pembuatan 2004 dan 2 unit mobil Ambulance merek/tipe KIA K2700 tahun pembuatan 2006 dengan kondisi rusak berat.

Tabel I.7 Rekapitulasi Kendaraan Roda 2 KKP Kelas I Makassar Tahun 2019

No	Nama Barang	Merek/Type	Jumlah	Status
1	Sepeda Motor	Honda Supra X 125	2	Baik
2	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter	2	Baik
3	Sepeda Motor	Honda Revo	2	Baik
4	Sepeda Motor	Suzuki Axelo	3	Baik
5	Sepeda Motor	Honda Beat	3	Baik
Jumlah			12	Unit

Sumber : Data Laporan BMN KKP Kelas I Makassar, 2019

Tabel rekapitan kendaraan roda 2 menunjukkan dari 12 unit sepeda motor yang dimiliki KKP Kelas I Makassar tahun 2019 semuanya dalam kondisi baik.

Kendaraan roda 2 yang dilelang tahun 2019 sebanyak lima yakni 1 unit sepeda motor merek/tipe Honda NF 125 SF tahun pembuatan 2006, 1 unit sepeda motor merek/tipe Suzuki FD 125 XSD tahun pembuatan 2006, dan 3 unit sepeda motor merek/tipe Honda GL 160 D tahun pembuatan 2007.

Terdapat tiga unit kendaraan yang telah dilelang tahun 2017 namun keluar SK penghapusan di tahun 2019 yakni 1 unit mobil Pick Up merek/tipe Toyota KF 60, 1 unit sepeda motor merek/tipe Suzuki FD 125 XSD dan 1 unit sepeda motor merek/tipe Honda NF 125 SF.

Kendaraan bermotor lainnya yang dimiliki di KKP Kelas I Makassar yakni 1 buah perahu karet bermotor yang ada di Wilker Pelabuhan Makassar dalam kondisi rusak berat.

2) Barang tidak bergerak

Berikut data rekapitulasi tanah dan bangunan KKP Kelas I Makassar tahun 2019 :

Tabel I.8 Rekapitulasi Tanah dan Bangunan KKP Kelas I Makassar Tahun 2019

No	Nama Barang	Kondisi	Kuantitas(m2)	Alamat
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol.II	Baik	120 M ²	Jl. Kebun Sayur Utara Kota Parepare
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol.II	Baik	204 M ²	Jl. Perumnas Toddopuli V No.9 Makassar
3	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	Baik	4000 M ²	Dusun Baddo- Baddo Kec.Baji Mangngai Maros
4	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	Baik	1230 M ²	Desa/Kec. Cappa Galung Kec.Bacukiki Parepare
5	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	Baik	1360 M ²	Jl. Yos Sudarso Kel. Cellu Kec. Tanete Riattang Timur
6	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	Baik	2531 M ²	Desa Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo
7	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	Baik	800 M ²	Kel.Mangempang Kec.Barru Kab.Barru
8	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	Baik	1000 M ²	Jl. Pelabuhan Bira Kab. Bulukumba
9	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Baik	12,160 M ²	Jl. Poros Mamuju - Pasangkayu Sulawesi Barat
10	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	672 M ²	Jl. Bandara Lama Kab. Maros
11	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	1000 M ²	Jl. Hatta No.3 Makassar (Pelabuhan Makassar)
12	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	1718 M ²	Dusun Baddo- Baddo Kec.Baji Mangngai Maros
13	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	500 M ²	Desa/Kec. Cappa Galung Kec.Bacukiki Parepare
14	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	850 M ²	Desa Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo
15	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	200.16 M ²	Jl. Yos Sudarso Kel. Cellu Kec. Tanete Riattang Timur
16	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	750 M ²	Jl. Poros Mamuju - Kalukku Sulawesi Barat
17	Rumah Negara Golongan II Type D	Baik	36 M ²	Jl. Kebun Sayur Utara Kota Parepare

Sumber : Data Laporan BMN KKP Kelas I Makassar, 2019

3. Dana

Penyelenggaraan kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar yang tertuang dalam realisasi anggaran belanja DIPA/RKAKL (daftar isian pelaksanaan anggaran), bersumber dari Rupiah Murni dan PNBPN. Jumlah PNBPN fungsional KKP Kelas I Makassar tahun 2019 sebanyak Rp. 13.845.401.008,- (*tiga belas milyar delapan ratus empat puluh lima juta empat ratus satu ribu delapan rupiah*), jumlah ini turun dibandingkan dengan tahun 2018 yang memperoleh PNBPN sebesar Rp. 16.866.159.002,- (*enam belas milyar delapan ratus enam puluh enam juta seratus lima puluh sembilan ribu dua rupiah*).

Penurunan PNBPN yang paling berpengaruh adalah dari vaksinasi meningitis. Terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional dimana klinik yang telah diverifikasi oleh KKP dapat membuka layanan vaksinasi meningitis dengan mendapatkan buku ICV di KKP menyebabkan PNBPN yang diterima hanya dari pembayaran buku ICV oleh klinik dan Rumah Sakit. Jemaah umrah bebas memilih KKP maupun klinik yang telah diverifikasi untuk pelayanan vaksinasi meningitis sehingga PNBPN di KKP berkurang cukup banyak.

RKAKL KKP Kelas I Makassar tahun 2019 mengalami lima kali revisi, dengan anggaran awal sebesar Rp. 26.660.063.000,-. DIPA Revisi 1 terbit tanggal 26 Februari 2019, DIPA Revisi 2 terbit tanggal 12 Juni 2019, DIPA Revisi 3 terbit tanggal 07 Oktober 2019 dan anggaran naik sebesar Rp. 30.351.307.000,- karena adanya penambahan pagu anggaran untuk belanja gaji dan tunjangan kinerja. Pada awal penyusunan anggaran 2019 belum memperhitungkan gaji dan tunjangan ke 14 sehingga anggaran tidak mencukupi. DIPA Revisi 4 terbit tanggal 24 Oktober 2019, dan DIPA Revisi 5 terbit tanggal 13 Desember 2019.

Tata cara revisi anggaran diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019. Revisi yang dilakukan untuk menyesuaikan perubahan Rencana Penarikan Dana melalui Revisi Halaman III DIPA maupun revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dengan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran yang dilakukan melalui Kanwil DJPBn guna memaksimalkan penyerapan anggaran dan optimalisasi sisa anggaran kegiatan.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN KERJA

A. DASAR HUKUM

1. UU Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular;
2. UU Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup
3. UU Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;
4. UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
5. UU Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pelayaran;
6. UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan;
7. UU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhanan;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespon Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia.
12. Permenkes 949 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
13. Permenkes 1501 tahun 2010 Tentang jenis penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah & Upaya penganggulangnya;
14. Permenkes RI No. 2348/Menkes/Per/XI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 356/Menkes/PER/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 61 Tahun 2015 tentang Fasilitas (FAL) Udara;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Sertifikat Sanitasi Kapal;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pemberian Sertifikat Vaksinasi Internasional;

20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit serta Pengendaliannya;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi internasional;
26. Kepmenkes Nomor 424 Tahun 2007 Tentang Pedoman Upaya Kesehatan Pelabuhan Dalam Rangka Karantina Kesehatan;
27. Keputusan Menkes Nomor 612/MENKES/SK/V/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan pada Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia;
28. Keputusan Menkes Nomor 1314/MENKES/SK/IX/2010 tentang Pedoman Standarisasi SDM, Sarana dan Prasarana di Lingkungan KKP;
29. Standar Operasional Prosedur Nasional Kegiatan KKP di Pintu Masuk Negara.
30. International Health Regulation Tahun 2005;

B. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR

1. Tujuan

1) Tujuan Umum

Mewujudkan pelabuhan dan bandara sehat melalui upaya cegah tangkal penyakit potensial wabah, pengendalian faktor risiko penyakit dan pelayanan kesehatan.

2) Tujuan Khusus

- a) Mencegah masuk dan keluarnya penyakit potensial wabah;
- b) Meningkatkan sistem kewaspadaan dini (SKD) KLB penyakit menular & penyakit menular potensial wabah;
- c) Mengendalikan faktor risiko penyakit dari angkutan beserta muatannya;

- d) Mengendalikan faktor risiko lingkungan pelabuhan dan bandara;
- e) Memberdayakan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.

2. Sasaran dan Indikator

Sasaran serta indikator tahun 2018 tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II.1 Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB	1 Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantina kesehatan	15.715 Sertifikat
		2 Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP	100 %
		3 Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit	1.253 Dokumen
		4 Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus	9 Lokasi
		5 Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah	4 Lokasi
		6 Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan	41.630 Sertifikat
		7 Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi	7 Lokasi
2	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan zoonotic	8 Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area	7 Lokasi
3	Menurunnya penyakit menular langsung	9 Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung	2.325 Orang
4	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	10 Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	48 Dokumen
		11 Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P	17 Jenis
		12 Jumlah pengadaan sarana prasarana	232 Unit

Sumber : Perjanjian Kinerja, 2019

Secara nyata, target tahun 2019 yang ada dalam RKAKL yang telah ditentukan dalam penyusunan perencanaan dan tertuang dalam DIPA KKP Kelas I Makassar adalah sebagai berikut :

Tabel II.2 Tabel Target per Kegiatan pada RKAKL KKP Kelas I Makassar Tahun 2019

Kode	Kegiatan	Target	
2058.004	<i>Layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB</i>	36	<i>Layanan</i>
2058.007	<i>Layanan Kekarantinaan Kesehatan</i>	1262	<i>Layanan</i>
2059.005	<i>Layanan Capaian Eliminasi Malaria</i>	2	<i>Layanan</i>
2059.009	<i>Layanan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit</i>	405	<i>Layanan</i>
2060.500	<i>Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS</i>	16	<i>Layanan</i>
2060.502	<i>Layanan Pengendalian Penyakit TBC</i>	15	<i>Layanan</i>
2063.951	<i>Layanan Sarana dan Prasarana Internal</i>	1	<i>Layanan</i>
2063.970	<i>Layanan Dukungan Manajemen Satker</i>	1	<i>Layanan</i>
2063.994	<i>Layanan Perkantoran</i>	1	<i>Layanan</i>

Sumber : RKAKL 2019

BAB III

STRATEGI PELAKSANAAN

A. STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Adapun strategi yang dilakukan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dalam RKAKL KKP Kelas I Makassar tahun 2019. Kegiatan yang telah tersusun tersebut mendukung dalam pencapaian tujuan dan sasaran baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kegiatan-kegiatan yang ada dalam RKAKL 2019 adalah sebagai berikut :

2058 Kegiatan Surveilans dan Karantina Kesehatan :

1. Orientasi petugas KKP dalam Pengendalian Penyakit Menular Berbahaya di Pintu Masuk Negara
2. Pertemuan Community Based Surveillance di Wilayah Kerja
3. Verifikasi Rumor penyakit potensial KLB/Penyelidikan Epidemiologi/Penanganan Bencana di wilayah
4. Layanan Kesehatan Pada Situasi Khusus
5. Penyusunan Rencana Kontinjensi Penanggulangan KKM di Pel Palopo dan Pel Belang Belang
6. Review Renkon di Bandara Hasanuddin
7. Review Renkon di Pelabuhan Bajoe Bone
8. Table Top Exercise di Bandara Hasanuddin
9. Table Top Exercise di Pelabuhan Bajoe Bone
10. Langganan Internet Service Provider
11. Evaluasi Simkespel
12. Konsultasi Sistem Pelaporan & Penerbitan Dokumen melalui Simkespel
13. Diklat teknis bidang surveilans dan karantina kesehatan
14. On Job Training Pengawasan Kualitas Lingkungan
15. Peningkatan kompetensi petugas teknis sanitasi lingkungan
16. Pelatihan ATLS / GELS
17. Pelatihan BTCLS
18. Pengawasan faktor risiko kesehatan pra embarkasi haji bagi pelaku perjalanan internasional
19. Pengawasan faktor risiko kesehatan pasca debarkasi haji
20. Pelaksanaan pelayanan pengawasan PHEIC 24 Jam sehari dan 7 Hari seminggu
21. Pelaksanaan Pra Embarkasi
22. Pengawasan sanitasi bangunan/gedung/perkantoran/industri/TTU/TPM

23. Pengambilan, Pemeriksaan dan Rujukan Sampel Lingkungan
24. Pemusnahan Limbah Medis
25. Pengawasan faktor risiko dalam rangka arus mudik
26. Kursus Penjamah Makanan
27. Penyuluhan Hygiene Sanitasi Makanan Bagi Pengolah Makanan Jajanan/Warung
28. Sosialisasi Undang-Undang Kekejarantinaan Kesehatan di Wilayah Kerja
29. Rapat Konsolidasi Internal Bidang UKLW
30. Konsultasi/ Koordinasi Peningkatan Pengawasan Faktor Risiko Penyakit
31. Konsultasi teknis dan manajemen Pengendalian Karantina dan SE
32. Pertemuan koordinasi program & penguatan jejaring kerja
33. Konsultasi Petugas wilker ke Induk
34. Koordinasi dengan lintas sektor terkait (koordinasi, integrasi, sinkronisasi program karkes dan kespel)
35. Konsultasi teknis terkait pelayanan vaksinasi bagi pelaku perjalanan internasional
36. Pertemuan Coffe Morning dengan LS/LP/jumat bersih
37. Pertemuan Penguatan Jejaring LS/LP dalam pengendalian FR Kesmas
38. Advokasi dan koordinasi pencegahan dan pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja
39. Rapat Koordinasi dengan Rumah Sakit Rujukan dan Lintas Sektor
40. Pelayanan Kesehatan Embarkasi Haji
41. Pelayanan Kesehatan Debarkasi Haji
42. Bimtek Layanan Kekejarantinaan Kesehatan di Wilayah Kerja
43. Pemeriksaan Sanitasi Alat Angkut
44. Penyediaan Bahan Kesehatan
45. Penyediaan Bahan Pemeriksaan Habis Pakai
46. Pengadaan Bahan Kesehatan Laboratorium Kesehatan Lingkungan Haji
47. Layanan Pemeriksaan Kesehatan Alat Angkut Dalam Rangka Penerbitan SSCC/SSCEC (Ship Sanitation Control Certificate/ Ship Sanitation Control Exemption Certificate)
48. Layanan Kekejarantinaan Kesehatan dalam rangka Penerbitan CoP (Certificate of Pretique)
49. Layanan Kekejarantinaan Kesehatan di Bandar Udara
50. Layanan Kekejarantinaan Kesehatan Dalam Rangka Penerbitan PHQC (Port Health Quarantine Clearence)
51. Layanan Kekejarantinaan Pengawasan Tindakan Penyehatan Alat Angkut (Penerbitan PHQC)

52. Layanan Pemeriksaan P3K Kapal

2059 Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik

1. Surveilans Migrasi di Pelabuhan dan Bandara, termasuk Malaria Cross Border
2. Pertemuan Surveilans Migrasi di Bandara dan Pelabuhan
3. Monev Resistensi / Efikasi Insektisida (Awerange, Parepare, Palopo, Bulukumba)
4. Bahan dan kelengkapan pengendalian vektor
5. Pertemuan Koordinasi dan sosialisasi Program Pengendalian Vektor dan PBB
6. Koordinasi dan Konsultasi Wilker ke Induk
7. Koordinasi dan Konsultasi Teknis Pengendalian Vektor
8. Mengikuti pertemuan, Seminar, Kursus yang berhubungan dengan pengendalian vektor
9. Monitoring Program Pengendalian Vektor
10. Konsultasi Persiapan Diklat Pengendalian Vektor & BPP
11. Diklat Pengendalian Vektor & BPP
12. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Diklat
13. Diklat Jabfung Entomolog
14. Fogging (Layanan Pengendalian Vektor DBD)
15. Pemetaan (Layanan Survey Vektor Pes)
16. Persiapan Bahan dan Alat (Layanan Survey Vektor Pes)
17. Pemasangan Perangkap (Layanan Survey Vektor Pes)
18. Identifikasi Tikus dan Pinjal (Layanan Survey Vektor Pes)
19. Spraying (Layanan Pengendalian Vektor Diare)
20. Praying IRS (Layanan Pengendalian Vektor Malaria)
21. Survey dan larvasida (Layanan survey vektor DBD)
22. Survey dan larvasida (Layanan survey vektor Diare)
23. Survey jentik (Layanan Survey Vektor Malaria)
24. Survey nyamuk (Layanan Survey Vektor Malaria)

2060 Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung

1. Sosialisasi dan Deteksi Dini HIV -AIDS (VCT Mobile) di Wilayah Kerja
2. Evaluasi Hasil Deteksi Dini HIV-AIDS di Wilayah Kerja
3. Biaya alat habis pakai (Layanan tes HIV dan IMS di KKP) (SBK)

4. Deteksi dini penyakit TB di Wilayah Kerja Pelabuhan / Bandara
5. Blaya alat habis pakai (Layanan deteksi dini terduga TBC Wilayah kerja KKP) (SBK)

2063 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

1. Pengadaan kendaraan bermotor
2. Pengadaan perangkat pengolah data untuk penerbitan dokumen online
3. Peralatan dan fasilitas perkantoran
4. pengadaan kelengkapan poliklinik/ Laboratorium
5. Penyusunan RKA-KL
6. Pembahasan dan penelaahan usulan dokumen perencanaan anggaran dan revisi anggaran
7. Penyusunan target dan pagu PNBPNBP
8. Penyusunan laporan pelaksanaan program (U)
9. Penyusunan Laporan E Monev (U)
10. Penyusunan Laporan Tahunan satker (U)
11. Penyusunan LAKIP dan Perjanjian Kinerja (U)
12. Evaluasi SAKIP (U)
13. Penyusunan profil dan media KIE (P)
14. Penyusunan Realisasi Anggaran Bulanan/Triwulan/ Semester/Tahunan (U)
15. Verifikasi dan Rekonsiliasi LK UAPPA E-1 Laporan Keuangan Satker Pusat, UPT, Dekon Tahun 2017 dan Semester I TA 2018 (U)
16. Rekonsiliasi Pengelolaan PNBPNBP (U)
17. Koordinasi Pengelolaan PNBPNBP (U)
18. Penyusunan Dokumen Perbendaharaan dan Pertanggung jawaban Keuangan (U)
19. Upaya Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (U)
20. Peningkatan Kompetensi (U)
21. Analisis Kebutuhan dan Perencanaan Pegawai (U)
22. Layanan Mutasi Kepegawaian (U)
23. Pelayanan Hukum
24. Pengelolaan Rumah Tangga
25. Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
26. Layanan Humas
27. Layanan Organisasi Tatalaksana
28. Pengelolaan BMN

29. Pembayaran Gaji dan Tunjangan
30. Belanja keperluan sehari-hari perkantoran
31. Belanja untuk menambah daya tahan tubuh
32. Pengadaan pakaian dinas
33. Pengadaan pakaian kerja dokter/satpam/sopir/tenaga lainnya
34. Pemeliharaan gedung dan bangunan
35. Pemeliharaan/perbaikan peralatan/mesin kantor
36. Pemeliharaan kendaraan R4
37. Pemeliharaan kendaraan R2
38. Perbaikan peralatan fungsional
39. Langganan daya dan jasa
40. Belanja pengiriman surat dinas pos pusat
41. Honor yang terkait dengan operasional satuan kerja
42. Honor petugas pramubakti, pengamanan kantor, sopir dan cleaning service
43. Sewa gedung/kantor/wilker
44. Sewa rumah jabatan
45. Kalibrasi alat-alat kesehatan
46. Pas pelabuhan/bandara
47. Cleaning services
48. Sewa Mesin Fotocopy
49. Pengadaan Tirai/Gorden
50. Sewa Kendaraan Operasional
51. Pemeriksaan Kesehatan ASN

B. HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN STRATEGI

Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan yang ada dalam RKAKL 2019 yakni :

1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan masih belum maksimal sehingga realisasi pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) yang telah disusun pada awal tahun.
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mengalami penurunan.
3. Masih terdapat kegiatan yang tidak terealisasi sehingga mempengaruhi capaian output layanan.
4. Pencairan anggaran kegiatan yang dilakukan oleh Wilker masih kurang.
5. Masih terbatasnya sarana dan prasarana termasuk jumlah tenaga khususnya di wilayah kerja.

C. TEROBOSAN YANG DILAKUKAN

Beberapa kegiatan yang terlaksana di tahun 2019 sebagai terobosan dan upaya dalam pencapaian target realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan diantaranya adalah :

1. Pertemuan Pembahasan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) UPT

Ditjen P2P Regional Sulawesi

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar menjadi tuan rumah dalam pertemuan pembahasan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) tahun 2019, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Regional Sulawesi pada Hari Rabu, 6 Februari 2019. Pertemuan ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI, dr. Anung Sugihantono, M.Kes.

Selain membahas ROK 2019, dipaparkan pula realisasi anggaran tahun 2018 serta hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan paparan realisasi anggaran tahun 2018, KKP Kelas I Makassar berhasil merealisasikan 95,35% anggarannya. Pada tahun 2019 Kepala KKP Kelas I Makassar optimis realisasi anggaran dapat lebih baik dari tahun sebelumnya hingga mencapai 97%. Harapan Kepala KKP Kelas I Makassar pada awal tahun 2019 ini terbukti dengan realisasi anggaran mencapai 97,41%. Berita mengenai pertemuan pembahasan ROK ini juga ditampilkan dalam berita website.

Beberapa catatan atas ROK tahun 2019 KKP dan BTKLPP di Sulawesi yakni : Rencana Operasional Kegiatan bukan hanya dokumen administrasi namun merupakan alat manajemen. Minimal 80% anggaran adalah untuk kegiatan layanan tugas pokok dan fungsi. Pengelolaan dan kepemilikan asset agar dapat dikelola secara tertib dan akurat. Permasalahan penyerapan anggaran yang berkaitan dengan Standar Biaya Keluaran (SBK) yang menjadi kendala operasional tahun 2018 akan dikaji kembali. Pengadaan ambulance yang terkendala oleh e-Catalog agar diberikan batas waktu hingga bulan Maret. Narasumber pusat yang diundang dalam pertemuan tidak perlu dipaksakan harus ada, manfaatkan KKP Kelas I terdekat yang dapat dijadikan sebagai narasumber. Lebih mencermati kegiatan dengan peserta yang sama agar dijadikan satu kegiatan



Gambar III.1 Pertemuan Pembahasan ROK UPT Ditjen P2P Regional Sulawesi

2. KKP Kelas I Makassar Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal P2P Kemenkes RI Nomor : PS.03.03/2/1631/2019 tanggal 12 Juli 2019 Hal : Pembangunan Zona Integritas Satker Menuju WBK/WBBM Prioritas Kawasan Bandar Udara dan Pelabuhan Laut, KKP Kelas I Makassar menjadi salah satu Satker yang diusulkan untuk dilakukan Pre Assesment dan Assessment Satker Menuju WBK/WBBM tahun 2019. KKP lain yang diusulkan yakni KKP Kelas I Tanjung Priok, Denpasar, Surabaya, Soekarno Hatta, Medan, Batam, dan KKP Kelas II Semarang.

Tindak lanjut dari pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dibentuklah Tim Pembangunan Zona Integritas di KKP Kelas I Makassar yang terbagi atas Pokja I – VI, Pokja I (Manajemen Perubahan), Pokja II (Penataan Tatalaksana), Pokja III (Penataan Sistem Manajemen SDM), Pokja IV (Penguatan Akuntabilitas), Pokja V (Penguatan Pengawasan), Pokja VI (Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik). Pada tanggal 11 - 12 September dilaksanakan Pre Assesment Pokja Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM oleh Tim dari Inspektorat Jenderal Kemenkes RI.



Gambar III.2 Pre Assessment oleh Tim Itjen Kemenkes RI

3. Rapat Sinkronisasi Rencana Operasional Kegiatan (ROK) Tahun Anggaran 2020

DIPA TA 2020 terbit pada tanggal 12 November 2019, persiapan pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2020 yakni Rencana Operasional Kegiatan telah disusun pada akhir tahun 2019. Sebagai bentuk optimalisasi, penguatan jejaring kerjasama dan efektifitas pelaksanaan kegiatan tahun 2020, perlu dilaksanakan sinkronisasi ROK untuk melihat kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan kolaborasi. Rapat sinkronisasi ROK KKP Kelas I Makassar, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Pencegahan Penyakit (BTKLPP) Kelas I Makassar dilaksanakan tanggal 19 Desember 2019 bertempat di ruang rapat pimpinan KKP Kelas I Makassar. Berdasarkan hasil diskusi yang dilaksanakan, beberapa kegiatan yang ada di KKP Kelas I Makassar dapat dikolaborasikan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dan BTKLPP Kelas I Makassar.

Kegiatan KKP Kelas I Makassar tahun 2020 yang dapat dikolaborasikan cukup banyak baik dalam bentuk keikutsertaan sebagai peserta kegiatan, penyiapan bahan kesehatan, penyampaian data hasil kegiatan dan sebagainya. Diharapkan bentuk kolaborasi yang telah disepakati dapat terealisasi pada tahun 2020.



Gambar III.3 Rapat Sinkronisasi ROK Tahun 2020

BAB IV
HASIL KERJA

A. PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Tabel IV.1 Pencapaian Target Perjanjian Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Indikator RAP Ditjen P2P	KKP Kelas I Makassar		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan	Persentase alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan sebesar 100%	15.715 Sertifikat	16.816 sertifikat	107,01 %
2	Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP	Persentase respon penanggulangan terhadap sinyal kewaspadaan dini kejadian luar biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB di kabupaten/kota sebesar 100 %	100 %	100 %	100 %
3	Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit	Persentase penerbitan dokumen kekarantinaan kesehatan sebesar 100%	1.253	1.533	122,35%
4	Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus	Persentase Pelabuhan, Bandara, dan Pos Lintas Batas Darat yang melaksanakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah sebesar 100 %	9 lokasi	12 lokasi	133,33 %
5	Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah		4 lokasi	4 lokasi	100%
6	Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan		41.630 sertifikat	65.472 sertifikat	157,27 %
7	Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi	Persentase faktor risiko kesehatan yang dikendalikan di pelabuhan, bandar udara, dan Pos Lintas Batas Darat sebesar 100%	7 lokasi	6 lokasi	85,71 %
8	Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area	Persentase pelabuhan/bandara/PLBD yang bebas dari faktor risiko penyakit tular vektor sebesar 100%	7 lokasi	7 lokasi	100%
9	Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung	Persentase deteksi dini penyakit menular langsung	2.325 orang	2.720 orang	116,99 %

		Pelabuhan/Bandar Udara/PLBD sebesar 100%			
10	Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	Persentase Satker Program P2P yang menerapkan manajemen pengelolaan data dan informasi sebesar 100 %	48 dokumen	49 dokumen	102,08 %
11	Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P	Persentase Satker Program P2P yang memperoleh penilaian SAKIP dengan hasil AA	17 jenis	19 jenis	111,76 %
12	Jumlah pengadaan sarana prasarana	Persentase Satker Pusat dan Daerah yang ditingkatkan sarana/prasarananya untuk memenuhi standar sebesar 69%	232 unit	233 unit	100,43 %
Rata-Rata Capaian					111,41 %

Terdapat tiga capaian indikator yang mencapai 100 %, delapan indikator yang mencapai di atas 100 %, namun juga terdapat satu indikator dengan capaian 85,71 %. Indikator yang belum tercapai adalah jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi, dari 7 lokasi yang menjadi target, hanya 6 lokasi yang memenuhi syarat sanitasi.

Adapun masalah yang dihadapi sehingga indikator tersebut tidak tercapai adalah: pencapaian pelabuhan dan bandara sehat memerlukan perhatian seutuhnya oleh setiap pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Rekomendasi dari hasil pemeriksaan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dilakukan perbaikan dengan beberapa hal :

1. Perbaikan infrastruktur dibutuhkan ketersediaan anggaran dan membutuhkan waktu yang lama;
2. Penggunaan kios tidak sesuai dengan fungsinya;
3. Feedback pihak terkait dari rekomendasi yang telah disampaikan kurang maksimal;
4. Jumlah SDM sanitarian yang ada di wilayah kerja masih kurang;
5. Kesadaran masyarakat tentang pelabuhan/bandara sehat perlu ditingkatkan.

Usul pemecahan masalah yang dapat diberikan adalah diharapkan untuk sementara tidak ada kegiatan operasional sebelum dilakukan perbaikan infrastruktur; mengembalikan kios ke fungsi semula sebagai tempat penjualan makanan jadi; menginisiasi pertemuan lintas sektor terkait, membahas tentang permasalahan fungsi kios; Penambahan jumlah SDM sanitasi di wilayah kerja; Mengoptimalkan peran forum pelabuhan sehat; Pemberian edukasi

kepada masyarakat pelabuhan/bandara tentang faktor risiko terjadinya penularan penyakit berbasis lingkungan untuk mencapai pelabuhan dan bandara sehat

B. PENCAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja berdasarkan target kegiatan yang terdapat pada RKAKL 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.2 Tabel Pencapaian Target per Kegiatan pada RKAKL KKP Kelas I Makassar Tahun 2019

Kode	Kegiatan	Target		Realisasi		%
2058.004	Layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB	36	Layanan	36	Layanan	100
2058.007	Layanan Kekejarantinaan Kesehatan	1262	Layanan	1262	Layanan	100
2059.005	Layanan Capaian Eliminasi Malaria	2	Layanan	2	Layanan	100
2059.009	Layanan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	405	Layanan	400	Layanan	98,77
2060.500	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS	16	Layanan	16	Layanan	100
2060.502	Layanan Pengendalian Penyakit TBC	15	Layanan	15	Layanan	100
2063.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	Layanan	1	Layanan	100
2063.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	Layanan	1	Layanan	100
2063.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	1	Layanan	100

Sumber : Monev DJA, 2019

Berdasarkan tabel terlihat masih terdapat output yang belum mencapai target yakni pada output 2059.009 Layanan Pengendalian Vektor Malaria. Target volume output tidak tercapai pada kegiatan spraying IRS sebanyak 5 layanan karena keterbatasan sumber daya di wilker Pelabuhan Malili dan Belang-belang sehingga kegiatan tidak terlaksana.

C. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran KKP Kelas I Makassar tahun 2019 sebesar 97,41%. Anggaran awal DIPA KKP Kelas I Makassar tahun 2019 sebesar Rp. 26.660.063.000,- dan naik sebesar Rp. 30.351.307.000,- karena adanya penambahan pagu anggaran untuk belanja gaji dan tunjangan kinerja.

Tabel IV.3 Distribusi Realisasi Anggaran Belanja DIPA/RKAKL Pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2019

Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Akhir (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
26.660.063.000	30.351.307.000	29.565.479.751	785.827.249	97,41

Sumber : Data Realisasi SAS, 2019

Adapun rincian penggunaan atau realisasi anggaran RKAKL KKP Kelas I Makassar tahun 2018 per kegiatan dapat dilihat secara lengkap pada tabel berikutnya.

Tabel IV.4 Distribusi Realisasi Anggaran Per Kegiatan DIPA/RKAKL Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2019

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
024.05.08	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	30,351,307,000	29,565,479,751	97.41%
2058	Surveilans dan Karantina Kesehatan	4,495,042,000	4,296,637,132	95.59%
2058.004	Layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB [Base Line]	242,652,000	231,616,150	95.45%
2058.004.004	Layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB di KKP	171,427,000	160,896,150	93.86%
051	Refreshing petugas TGC dalam pengendalian penyakit menular berbahaya di pintu masuk Negara	96,110,000	90,636,500	94.30%
A	Orientasi petugas KKP dalam Pengendalian Penyakit Menular Berbahaya di Pintu Masuk Negara	96,110,000	90,636,500	94.30%
052	Jejaring surveilans dan kemitraan pintu masuk negara dan wilayah	15,737,000	14,097,150	89.58%
A	Pertemuan Community Based Surveillance di Wilayah Kerja	15,737,000	14,097,150	89.58%
055	Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan penyakit menular berbahaya di pintu masuk Negara	59,580,000	56,162,500	94.26%
A	Verifikasi Rumor penyakit potensial KLB/Penyelidikan Epidemiologi/Penanganan Bencana di wilayah	59,580,000	56,162,500	94.26%
2058.004.U02	Layanan Kesehatan Pada Situasi Khusus	71,225,000	70,720,000	99.29%
100	Layanan Kesehatan Pada Situasi Khusus	71,225,000	70,720,000	99.29%
2058.007	Layanan Kekarantinaan Kesehatan [Base Line]	4,252,390,000	4,065,020,982	95.59%
2058.007.003	Layanan Pelaksanaan Kekarantinaan Kesehatan di KKP	3,676,820,000	3,552,152,482	96.61%
052	Penyusunan Rencana Kontinjensi Penanggulangan KKM	84,440,000	83,160,000	98.48%
M	Penyusunan Rencana Kontinjensi Penanggulangan KKM di Pel Palopo dan Pel Belang belang	84,440,000	83,160,000	98.48%

053	Review dokumen rencana kontinjensi	90,499,000	88,179,000	97.44%
B	Review Renkon di Bandara Hasanuddin	44,839,000	44,195,000	98.56%
C	Review Renkon di Pelabuhan Bajoe Bone	45,660,000	43,984,000	96.33%
054	Pelaksanaan Table Top Exercise/Simulasi Penanggulangan KKM	79,355,000	77,537,500	97.71%
A	Table Top Exercise di Bandara Hasanuddin	39,435,000	38,516,500	97.67%
B	Table Top Exercise di Pelabuhan Bajoe Bone	39,920,000	39,021,000	97.75%
056	Sistem Pelaporan dan Penerbitan Dokumen melalui Simkespel	345,431,000	342,621,447	99.19%
A	Langgan Internet Service Provider	300,000,000	299,819,989	99.94%
B	Evaluasi Simkespel	18,555,000	17,576,000	94.72%
D	Konsultasi Sistem Pelaporan & Penerbitan Dokumen melalui Simkespel	13,576,000	13,465,458	99.19%
E	Penerbitan Dokumen Simkespel	13,300,000	11,760,000	88.42%
057	Pelatihan bagi petugas KKP	167,924,000	155,511,615	92.61%
A	Diklat teknis bidang surveilans dan karantina kesehatan	25,033,000	17,589,905	70.27%
D	On Job Training Pengawasan Kualitas Lingkungan	54,302,000	53,468,997	98.47%
E	Peningkatan kompetensi petugas teknis sanitasi lingkungan	43,069,000	42,311,113	98.24%
F	Pelatihan ATLS / GELS / Seminar /Pertemuan Ilmiah / ACLS	15,020,000	14,545,000	96.84%
G	Pelatihan BTCLS	5,080,000	5,080,000	100.00 %
H	Orientasi PPGD	25,420,000	22,516,600	88.58%
058	Pengawasan lalu lintas orang, barang, alat angkut	344,340,000	295,612,200	85.85%
A	Pengawasan faktor risiko kesehatan pra embarkasi haji bagi pelaku perjalanan internasional	83,000,000	82,887,300	99.86%
B	Pengawasan faktor risiko kesehatan pasca debarkasi haji	21,340,000	20,124,900	94.31%
E	Pelaksanaan pelayanan pengawasanPHEIC 24 Jam sehari dan 7 Hari seminggu	240,000,000	192,600,000	80.25%
060	Pengawasan dan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan	268,533,000	256,112,570	95.37%
G	Pelaksanaan Pra Embarkasi	7,050,000	6,600,000	93.62%
H	Pengawasan sanitasi bangunan/gedung/perkantoran/industri/TTU/TPM	22,950,000	22,555,650	98.28%
I	Pengambilan, Pemeriksaan dan Rujukan Sampel Lingkungan	140,605,000	134,340,000	95.54%
J	Pemusnahan Limbah Medis	38,050,000	34,426,000	90.48%
K	Pengawasan faktor risiko dalam rangka arus mudik	7,400,000	7,388,320	99.84%
L	Kursus Penjamah Makanan	34,410,000	32,760,000	95.20%
M	Penyuluhan Hygiene Sanitasi Makanan Bagi Pengolah Makanan Jajanan/Warung	18,068,000	18,042,600	99.86%
063	Advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan, Bandar Udara, PLBDN dan Wilayah	312,038,000	311,597,172	99.86%
C	Sosialisasi Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan di Wilayah Kerja	299,768,000	299,327,172	99.85%
D	Sosialisasi PP 64 Tahun 2019	12,270,000	12,270,000	100.00 %
064	Koordinasi Program Karantina Kesehatan di Pelabuhan, Bandar Udara, PLBDN dan Wilayah	385,661,000	357,244,623	92.63%
A	Rapat Konsolidasi Internal Bidang UKLW	1,440,000	1,392,000	96.67%
B	Konsultasi/ Koordinasi Peningkatan Pengawasan Faktor Risiko Penyakit	50,260,000	50,244,671	99.97%
C	Konsultasi teknis dan managemen Pengendalian Karantina dan SE	34,950,000	34,949,300	100.00 %
D	Pertemuan koordinasi program & penguatan jejaring kerja	32,080,000	28,960,484	90.28%
E	Konsultasi Petugas wilker ke Induk	33,360,000	33,359,000	100.00 %
F	Koordinasi dengan lintas sektor terkait (koordinasi, integrasi, sinkronisasi program karkes dan kespel)	26,520,000	26,509,500	99.96%

G	Konsultasi teknis terkait pelayanan vaksinasi bagi pelaku perjalanan internasional	32,050,000	28,988,049	90.45%
I	Pertemuan Coffe Morning dengan LS/LP/jumat bersih	58,846,000	48,329,500	82.13%
J	Pertemuan Penguatan Jejaring LS/LP dalam pengendalian FR Kesmas	40,355,000	31,457,000	77.95%
K	Advokasi dan koordinasi pencegahan dan pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja	23,625,000	23,625,000	100.00 %
L	Rapat Koordinasi dengan Rumah Sakit Rujukan dan Lintas Sektor	7,400,000	7,400,000	100.00 %
M	Koordinasi Program Kekarantinaan	44,775,000	42,030,119	93.87%
065	Pelayanan Kesehatan	1,259,409,000	1,251,548,590	99.38%
R	Pelayanan Kesehatan Embarkasi Haji	908,109,000	903,534,900	99.50%
S	Pelayanan Kesehatan Debarkasi Haji	351,300,000	348,013,690	99.06%
067	Bimtek ke wilayah kerja	153,200,000	150,653,000	98.34%
J	Bimtek Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Wilayah Kerja	153,200,000	150,653,000	98.34%
069	Penggandaan peraturan perundangan dan bahan pendukung dokumen kekarantinaan	24,160,000	21,513,800	89.05%
B	Pemeriksaan Sanitasi Alat Angkut	21,760,000	21,513,800	98.87%
C	Pemeriksaan Kekarantinaan Alat Angkut	2,400,000	-	0.00%
071	Pengadaan Bahan Kesehatan Kekarantinaan Kesehatan	161,830,000	160,860,965	99.40%
P	Penyediaan Bahan Kesehatan	75,830,000	75,335,965	99.35%
Q	Penyediaan Bahan Pemeriksaan Habis Pakai	36,000,000	35,625,000	98.96%
V	Pengadaan Bahan Kesehatan Laboratorium Kesehatan Lingkungan Haji	50,000,000	49,900,000	99.80%
2058.007.U01	Layanan Kekarantinaan Kesehatan Untuk Penerbitan SSCC/SSCEC	39,360,000	28,500,000	72.41%
100	Layanan Pemeriksaan Kesehatan Alat Angkut Dalam Rangka Penerbitan SSCC/SSCEC (Ship Sanitation Control Certificate/ Ship Sanitation Control Exemption Certificate)	39,360,000	28,500,000	72.41%
2058.007.U02	Layanan Kekarantinaan Kesehatan dalam Rangka Penerbitan COP (certificate of pratique)	27,500,000	22,350,000	81.27%
100	Layanan Kekarantinaan Kesehatan dalam rangka Penerbitan CoP (Certificate of Pratique)	27,500,000	22,350,000	81.27%
2058.007.U04	Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Bandar Udara	409,530,000	378,018,500	92.31%
100	Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Bandar Udara	409,530,000	378,018,500	92.31%
2058.007.U05	Layanan Kekarantinaan Kesehatan Dalam Rangka Penerbitan PHQC (Port Health Quarantine Clearance)	65,450,000	52,500,000	80.21%
100	Layanan Kekarantinaan Kesehatan Dalam Rangka Penerbitan PHQC (Port Health Quarantine Clearance)	65,450,000	52,500,000	80.21%
2058.007.U07	Layanan kekarantinaan pengawasan tindakan penyehatan alat angkut	2,730,000	1,500,000	54.95%
100	Layanan Kekarantinaan Kesehatan Dalam Rangka Penerbitan PHQC (Port Health Quarantine Clearance)	2,730,000	1,500,000	54.95%
2058.007.U08	Layanan Pemeriksaan P3K Kapal	31,000,000	30,000,000	96.77%
100	Layanan Pemeriksaan P3K Kapal	31,000,000	30,000,000	96.77%
2059	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik	1,331,900,000	1,261,316,590	94.70%
2059.005	Layanan Capaian Eliminasi Malaria [Base Line]	83,345,000	82,293,500	98.74%
2059.005.003	Layanan Pelaksanaan Pengendalian Malaria di Pelabuhan/Bandara/PLBD	83,345,000	82,293,500	98.74%
060	Surveilans Migrasi di Pelabuhan dan bandara, termasuk Malaria Cross Border	83,345,000	82,293,500	98.74%
A	Surveilans Migrasi di Pelabuhan dan Bandara, termasuk Malaria Cross Border	52,520,000	52,519,500	100.00 %
B	Pertemuan Surveilans Migrasi di Bandara dan Pelabuhan	30,825,000	29,774,000	96.59%
2059.009	Layanan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	1,248,555,000	1,179,023,090	94.43%

	[Base Line]			
2059.009.003	Layanan Pelaksanaan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit di Pelabuhan/Bandara/PLBD	1,044,447,000	1,005,230,090	96.25%
055	Monitoring Resistensi/Efikasi 2 Jenis Bahan Aktif Insektisida	54,882,000	52,373,000	95.43%
A	Monev Resistensi / Efikasi Insektisida (Awerange, Parepare, Palopo, Bulukumba)	54,882,000	52,373,000	95.43%
056	Sarana dan Prasana Pengendalian Vektor dan BPP seperti : Mesin Fog, Spaycan, Insektisida Parangkap Tikus, Entomologi Kit dll)	128,095,000	122,515,000	95.64%
A	Bahan dan kelengkapan pengendalian vektor	128,095,000	122,515,000	95.64%
058	Koordinasi , Advokasi dan Sosialisasi Pengendalian Vektor dan BPP di KKP	200,558,000	195,596,810	97.53%
A	Pertemuan Koordinasi dan sosialisasi Program Pengendalian Vektor dan PBB	54,998,000	54,792,556	99.63%
B	Koordinasi dan Konsultasi Wilker ke Induk	38,400,000	37,752,500	98.31%
C	Koordinasi dan Konsultasi Teknis Pengendalian Vektor	56,560,000	56,559,008	100.00 %
D	Mengikuti pertemuan, Seminar, Kursus yang berhubungan dengan pengendalian vektor	27,870,000	24,034,746	86.24%
E	Monitoring Program Pengendalian Vektor	22,730,000	22,458,000	98.80%
060	Diklat Pengendalian Vektor dan BPP Di bandara/Pelabuhan Laut	660,912,000	634,745,280	96.04%
A	Konsultasi Persiapan Diklat Pengendalian Vektor & BPP	12,550,000	12,516,000	99.73%
B	Diklat Pengendalian Vektor & BPP	492,142,000	489,199,784	99.40%
C	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Diklat	111,592,000	111,023,896	99.49%
D	Diklat Jabfung Entomolog	44,628,000	22,005,600	49.31%
2059.009.U01	Layanan Pengendalian Vektor DBD	42,750,000	41,211,000	96.40%
100	Layanan Pengendalian Vektor DBD	42,750,000	41,211,000	96.40%
A	Fogging	42,750,000	41,211,000	96.40%
2059.009.U02	Layanan survey vektor Pes	49,728,000	45,092,000	90.68%
100	Layanan Survey Vektor Pes	49,728,000	45,092,000	90.68%
A	Pemetaan	1,848,000	999,000	54.06%
B	Persiapan Bahan dan Alat	16,008,000	15,663,000	97.84%
C	Pemasangan Perangkap	31,392,000	27,950,000	89.04%
D	Identifikasi Tikus dan Pinjal	480,000	480,000	100.00 %
2059.009.U03	Layanan Pengendalian Vektor Diare	12,810,000	8,880,000	69.32%
100	Layanan Pengendalian Vektor Diare	12,810,000	8,880,000	69.32%
A	Spraying	12,810,000	8,880,000	69.32%
2059.009.U04	Layanan Pengendalian Vektor malaria	6,135,000	-	0.00%
100	Layanan Pengendalian Vektor Malaria	6,135,000	-	0.00%
A	Praying IRS	6,135,000	-	0.00%
2059.009.U05	Layanan Survei Vektor DBD	41,250,000	36,247,000	87.87%
100	Layanan survey vektor DBD	41,250,000	36,247,000	87.87%
A	Survey dan larvasida	41,250,000	36,247,000	87.87%
2059.009.U06	Layanan Survei Vektor Diare	4,725,000	3,225,000	68.25%
100	Layanan survey vektor Diare	4,725,000	3,225,000	68.25%
A	Survey dan larvasida	4,725,000	3,225,000	68.25%
2059.009.U07	Layanan Survei Vektor Malaria	46,710,000	39,138,000	83.79%
100	Layanan Survey Vektor Malaria	46,710,000	39,138,000	83.79%
A	Survey jentik	1,260,000	-	0.00%

B	Survey nyamuk	45,450,000	39,138,000	86.11%
2060	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	239,382,000	200,595,449	83.80%
2060.500	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS [Base Line]	134,382,000	125,612,900	93.47%
2060.500.001	Deteksi Dini HIV AIDS	93,507,000	84,747,900	90.63%
051	Pelaksanaan Mobile VCT (KKP)	93,507,000	84,747,900	90.63%
A	Sosialisasi dan Deteksi Dini HIV -AIDS (VCT Mobile) di Wilayah Kerja	47,115,000	44,614,500	94.69%
B	Evaluasi Hasil Deteksi Dini HIV-AIDS di Wilayah Kerja	46,392,000	40,133,400	86.51%
2060.500.U01	Deteksi Dini HIV AIDS (SBK)	40,875,000	40,865,000	99.98%
100	Layanan tes HIV dan IMS di KKP	40,875,000	40,865,000	99.98%
A	Biaya alat habis pakai	40,875,000	40,865,000	99.98%
2060.502	Layanan Pengendalian Penyakit TBC [Base Line]	105,000,000	74,982,549	71.41%
2060.502.002	Layanan Deteksi Dini Terduga TBC (UPT/KKP)	45,785,000	33,031,549	72.14%
051	Pelaksanaan Deteksi Dini Terduga TB	45,785,000	33,031,549	72.14%
A	Deteksi dini penyakit TB di Wilayah Kerja Pelabuhan / Bandara	45,785,000	33,031,549	72.14%
2060.502.U02	Layanan deteksi dini terduga TBC wilayah kerja KKP	59,215,000	41,951,000	70.85%
100	Layanan deteksi dini terduga TBC Wilayah kerja KKP	59,215,000	41,951,000	70.85%
A	Blaya alat habis pakai	59,215,000	41,951,000	70.85%
2063	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	24,284,983,000	23,806,930,580	98.03%
2063.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal [Base Line]	1,360,450,000	1,317,933,730	96.87%
051	Pengadaan kendaraan bermotor	630,000,000	589,200,000	93.52%
A	Pengadaan kendaraan bermotor	630,000,000	589,200,000	93.52%
052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	102,000,000	101,985,000	99.99%
A	Pengadaan perangkat pengolah data untuk penerbitan dokumen online	102,000,000	101,985,000	99.99%
053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	628,450,000	626,748,730	99.73%
A	Peralatan dan fasilitas perkantoran	453,200,000	452,938,300	99.94%
B	Pengadaan kelengkapan poliklinik/ Laboratorium	175,250,000	173,810,430	99.18%
2063.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker [Base Line]	1,558,830,000	1,483,122,606	95.14%
051	Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	213,801,000	210,315,400	98.37%
C	Penyusunan RKA-KL	97,432,000	93,970,100	96.45%
D	Pembahasan dan penelaahan usulan dokumen perencanaan anggaran dan revisi anggaran	97,100,000	97,090,800	99.99%
E	Penyusunan target dan pagu PNBPN / kordinasi PNBPN	19,269,000	19,254,500	99.92%
052	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	251,440,000	243,776,087	96.95%
A	Penyusunan laporan pelaksanaan program (U)	138,070,000	138,003,387	99.95%
B	Penyusunan Laporan E Monev (U)	7,210,000	7,202,200	99.89%
D	Penyusunan Laporan Tahunan satker (U)	6,030,000	6,030,000	100.00 %
G	Penyusunan LAKIP dan Perjanjian Kinerja (U)	15,940,000	9,580,000	60.10%
H	Evaluasi SAKIP (U)	24,000,000	24,000,000	100.00 %
I	Penyusunan profil dan media KIE (P)	60,190,000	58,960,500	97.96%
053	Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	340,135,000	333,885,948	98.16%
A	Penyusunan Realisasi Anggaran Bulanan/Triwulan/ Semester/Tahunan (U)	48,000,000	47,999,800	100.00 %
B	Verifikasi dan Rekonsiliasi LK UAPPA E-1 Laporan Keuangan Satker Pusat, UPT, Dekon Tahun 2017 dan Semester I TA 2018 (U)	73,150,000	71,927,648	98.33%

C	Rekonsiliasi Pengelolaan PNBP (U)	124,260,000	124,101,000	99.87%
D	Koordinasi Pengelolaan PNBP (U)	8,675,000	8,664,000	99.87%
F	Penyusunan Dokumen Perbendaharaan dan Pertanggung jawaban Keuangan (U)	53,250,000	49,598,500	93.14%
G	Upaya Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (U)	32,800,000	31,595,000	96.33%
054	Pengelolaan kepegawaian	72,580,000	71,442,100	98.43%
A	Peningkatan Kompetensi (U)	49,180,000	49,176,600	99.99%
B	Analisis Kebutuhan dan Perencanaan Pegawai (U)	16,960,000	15,834,000	93.36%
C	Layanan Mutasi Kepegawaian (U)	6,440,000	6,431,500	99.87%
055	Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan	680,874,000	623,703,071	91.60%
A	Pelayanan Hukum	32,310,000	29,425,600	91.07%
D	Pengelolaan Rumah Tangga	72,000,000	57,720,000	80.17%
E	Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	100,010,000	94,083,208	94.07%
F	Layanan Humas	79,240,000	70,440,500	88.90%
G	Layanan Organisasi Tatalaksana	341,795,000	318,034,063	93.05%
H	Pengelolaan BMN	55,519,000	53,999,700	97.26%
2063.994	Layanan Perkantoran [Base Line]	21,365,703,000	21,005,874,244	98.32%
001	Gaji dan Tunjangan	16,936,465,000	16,825,655,800	99.35%
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	16,936,465,000	16,825,655,800	99.35%
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	4,429,238,000	4,180,218,444	94.38%
A	Belanja keperluan sehari-hari perkantoran	244,470,000	236,043,398	96.55%
C	Pengadaan pakaian dinas	210,368,000	204,899,400	97.40%
D	Pengadaan pakaian kerja dokter/satpam/sopir/tenaga lainnya	30,636,000	29,808,900	97.30%
E	Pemeliharaan gedung dan bangunan	713,513,000	706,469,450	99.01%
F	Pemeliharaan/perbaikan peralatan/mesin kantor	99,304,000	67,306,300	67.78%
G	Pemeliharaan kendaraan R4	362,400,000	345,654,058	95.38%
H	Pemeliharaan kendaraan R2	15,000,000	5,069,017	33.79%
I	Perbaikan peralatan fungsional	6,078,000	-	0.00%
J	Langganan daya dan jasa	478,000,000	427,414,508	89.42%
K	Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	15,000,000	6,374,000	42.49%
L	Honor yang terkait dengan operasional satuan kerja	446,580,000	429,980,000	96.28%
M	Honor petugas pramubakti, pengamanan kantor, sopir dan cleaning service	1,198,000,000	1,170,000,000	97.66%
O	Sewa gedung/kantor/wilker	36,000,000	33,771,356	93.81%
P	Sewa rumah jabatan	30,000,000	30,000,000	100.00 %
Q	Kalibrasi alat-alat kesehatan	9,000,000	680,000	7.56%
R	Pas pelabuhan/ bandara	40,002,000	39,643,607	99.10%
T	Cleaning services	58,652,000	56,603,450	96.51%
V	Sewa Mesin Fotocopy	8,400,000	8,400,000	100.00 %
W	Pengadaan Tirai/Gorden	205,535,000	195,406,000	95.07%
X	Sewa Kendaraan Operasional	38,500,000	37,800,000	98.18%
Y	Pemeriksaan Kesehatan ASN	151,800,000	148,895,000	98.09%
Z	Dokumen Izin/ Upaya Pengelolaan Lingkungan	32,000,000	0	0.00%

Sumber : Data Realisasi SAS, 2019

D. UPAYA UNTUK MERAH WTP DAN REFORMASI BIROKRASI

Upaya yang dilakukan KKP Kelas I Makassar untuk meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah :

1. Melakukan pembenahan SDM Pengelola Keuangan
2. Melakukan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan
3. Melakukan pembenahan pengelolaan BMN dan pelaporannya
4. Memperbaiki penatausahaan dalam pengelolaan PNBK
5. Melakukan percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
6. Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
7. Melakukan penguatan monitoring dan evaluasi
8. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku
9. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan

BAB IV PENUTUP

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, setiap pimpinan suatu organisasi wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Salah satu laporan berkala yaitu laporan tahunan.

Laporan tahunan merupakan laporan yang bersifat komprehensif, mencerminkan semangat untuk maju, “think out of the box”. Laporan tahunan deskriptif menerangkan tentang resume kegiatan, program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun laporan.

Berbagai hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan pada tahun 2017 menunjukkan bahwa peran dan fungsi KKP sangat dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan. Tupoksi yang diemban, memberi isyarat bahwa keberadaan KKP dalam sistim pelayanan kesehatan di Indonesia merupakan garda terdepan dalam upaya menangkal masuknya penyakit ke tanah air. Hasil-hasil kegiatan yang dilakukan perlu dituangkan dalam dokumen sehingga dapat menjadi informasi yang berguna baik kepada pengambil kebijakan, lintas sektor terkait maupun kepada pengguna jasa pelabuhan/bandara.

Data dan informasi yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini sangat berguna bagi pengembangan KKP kedepan, kepentingan riset kesehatan dan bahan evaluasi kegiatan program. Laporan Tahunan KKP Kelas I Makassar tahun 2019 ini juga dapat menjadi salah satu rujukan data dan informasi yang sangat bermanfaat dalam manajemen kesehatan pelabuhan.

Keberadaan Laporan Tahunan tahun 2019 ini untuk mencapai validasi data dan kontinuitas informasi di tingkat KKP Kelas I Makassar guna menjawab tuntutan perkembangan teknologi informasi. Harapan dalam penyusunan Laporan Tahunan ini akan memberikan deskripsi yang jelas dan sah sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut guna menentukan kebijakan selanjutnya pada setiap unit decisin maker. Sangat disadari bahwa Laporan Tahunan ini belum dapat memenuhi harapan dalam penyediaan sistim informasi kesehatan pelabuhan. Namun apa yang disajikan dalam Laporan Tahunan ini dapat memberikan gambaran secara garis besar dan menyeluruh tentang seberapa besar upaya cegah tangkal yang telah diperankan oleh KKP Kelas I Makassar.